



Research Paper Publication
Majalah Ilmiah Manajemen
Terminal Informasi Ilmiah

ISSN : 2089-2330

Vol : 09.01.2020
Hal : 122-136

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 06/Permentan/ OT. 140/2/2015 TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
DI KOTA PRABUMULIH**

¹Farid Wadjdi, ²Ita Oktavia

Email : faridwadjdi30@gmail.com

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin

Article Info

Keywords :
Ministerial Regulation, PUAP
Program, and Implementation.

Abstract

Based on the results of the study showed that the PUAP program in the City of Prabumulih, in general has been implemented according to procedures established by the Ministry of Agriculture, The influence of external environmental factors (environmental factors) namely cultural, social and political factors at one target group location, which causes delays in the distribution / realization of PUAP BLM funds, found factors that strengthen the implementation of the program include: Communication about the substance of the program delivered with both through socialization activities, Availability of field implementor human resources (advisors and PMT), Existence and self-help in Gapoktan sourced from principal savings, mandatory savings and voluntary savings, are strengthening community capital in Gapoktan institutions in addition to BLM PUAP stimulant funds, Team Resources resources authority Strong PUAP technique, High commitment and motivation from field implementation and found factors that weaken PUAP program implementation which include: Limitation of Gapoktan management human resources, Lack of budgetary resources, Limited resource authority for instructors, Lim sumberdaya limited information resources related to reporting mechanisms and the importance of reporting implementation even though our reporting technical has been consulted by PMT and the Provincial PUAP Guidance Team and declared no problem, Inadequate facility resources (supporting facilities) inhibited Fragmentation due to lack of coordination between the teams.

¹Farid Wadjdi, ²Ita Oktavia

faridwadjdi30@gmail.com

Majalah Ilmiah Manajemen – Vol : 09.01.2020

Pendahuluan

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan dari Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antar sub sektor. Dicanangkan pada Tahun 2008 melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai pelaksana langsung program PUAP diharapkan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Penyaluran dana ini difokuskan pada daerah-daerah tertinggal yang memiliki potensi pertanian agribisnis (Departemen Pertanian : 2008). Awalnya PUAP disalurkan bagi 389 Kabupaten/Kota (10.542 gapoktan), dan terus meningkat hingga pada Tahun 2011 digulirkan untuk 445 Kabupaten/Kota (9.110 gapoktan) (Dwimanur dan Wibowo, 2014).

Pemerintah berharap dana tersebut dapat berkembang melalui Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) pada Tahun Pertama yang selanjutnya berkembang menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Tahun Kedua dan koperasi pada Tahun Ketiga (Utami, 2015). Dampak sosial program PUAP berupa bertambahnya wawasan petani mengenai simpan-pinjam di Gapoktan dan meningkatnya interaksi antar petani, sedangkan dari sisi ekonomi, dampak program ini yakni petani dapat memperoleh pinjaman dengan prosedur dan syarat yang mudah, petani tidak terikat lagi kepada tengkulak serta pendapatan petani dan kesempatan kerja juga akan meningkat (Martiana dkk, 2012, Suandi dkk, 2012, Erna dkk, 2014).

Evaluasi dalam pengembangan program PUAP merupakan proses untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu dalam sistem perencanaan, penyusunan program dan system pengambilan keputusan yang bersifat antisipatif, sehingga di masa depan dapat dikembangkan program PUAP yang progresif dan dinamis (Pasaribu dkk, 2011). Dari hasil monitoring dan evaluasi Nasional ternyata banyak Gapoktan yang gagal mengembangkan dana PUAP karena kapasitas Sumber Daya Manusia tidak mampu mengelola dana serapan dan perputaran dana PUAP rendah, ada petani yang terlambat mengangsur bahkan tidak mengembalikan dana serta penyimpangan Penggunaan dana untuk aktivitas konsumtif (Pangestika dkk, 2013, Supardi dkk, 2015, Zanzes dkk, 2015).

Jumlah Gapoktan penerima dana PUAP dari Tahun 2009-2015 sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) Gapoktan, dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) Gapoktan yang ada di Kota Prabumulih. Seluruh Gapoktan penerima Dana PUAP di Kota Prabumulih telah menerima dan menyalurkan dana tersebut hingga seluruh anggota Gapoktan yang mengajukan permohonan pinjaman dana. Jenis usaha produktif yang dikembangkan oleh Gapoktan di Kota Prabumulih mencakup : a) kegiatan budidaya (*On Farm*) tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, serta non budidaya (*Off Farm*) yakni industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro (bakulan, dll) dan usaha lain berbasis pertanian (Kementerian Pertanian, 2011.a)

Implementasi program PUAP di Kota Prabumulih sangat bermanfaat, hal ini dapat dibuktikan dari peningkatan jumlah anggota Gapoktan, nilai aset yang dimiliki dan telah memiliki LKM-A meskipun baru embrio dalam arti masih melakukan Usaha Simpan Pinjam (USP) tetapi sudah mengarah ke LKM-A. Gapoktan telah memiliki struktur organisasi, AD/ART dan rencana kerja.

Petani penerima dana PUAP dipilih secara selektif oleh pengurus dan Gapoktan telah memiliki kerjasama dengan pemangku adat setempat. Permasalahan PUAP di Kota Prabumulih saat ini adalah pengembalian Dana PUAP dari anggota Gapoktan sering mengalami kemacetan. Seleksi dan verifikasi kurang memperhatikan kelayakan usaha anggota dan pembinaan serta pendampingan dari Tim Pembina dan Tim Teknis kurang intensif dilakukan (Suprpto, 2012).

Metodelogi Penelitian

Metodologi Penelitian/Pendekatan Penelitian.

Metode secara etimologis didefinisikan sebagai cara atau prosedur, sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru. Secara sederhana metode penelitian ini didefinisikan sebagai serangkaian cara atau prosedur dalam suatu kegiatan ilmiah untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru. Menurut Bungin (2011:77), bahwa persoalan yang patut dikedepankan dalam metode penelitian adalah dengan cara apa dan bagaimana data dikumpulkan, sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan data yang *valid* dan *reliable*.

Dengan kata lain, bagian terpenting dari suatu metode penelitian meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar, 2009:78). Menurut Saleh dkk, (2012), evaluasi kinerja pelaksanaan program PUAP ditinjau dari lima indikator yaitu *input* (masukan), *process* (proses), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), dan *impact* (dampak).

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian di bidang sosial dengan teknik analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Terkait hal ini, Hutomo dalam Bungin (2011:91), menyatakan bahwa :

“Penelitian sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif mempunyai ciri-ciri : (1) sumber data bersifat ilmiah (pemahaman fenomena secara langsung); (2) interpretasi data; (3) bersifat deskriptif; (4) penelitian digunakan untuk memahami bentuk-bentuk atau kasus-kasus tertentu; (5) analisis berbentuk induktif; (6) di lapangan peneliti berlaku seperti masyarakat yang diteliti; (7) data dan informan harus berasal dari

tangan pertama; (8) kebenaran data harus di cek dengan data lain/*triangulasi*; (9) orang atau sesuatu yang dijadikan subyek penelitian disebut partisipan; (10) titik berat perhatian pada pandangan *emic* (masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti, bukan dari kacamata peneliti (*epic*), (11) dalam pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*; (12) dapat menggunakan data kuantitatif dan kualitatif”

Ruang Lingkup Penelitian/Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk membatasi pokok masalah agar lebih mudah dioperasionalkan dilapangan sehingga didapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan dalam bentuk program berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015, dimana ruang lingkup pelaksanaan program meliputi : (1) Identifikasi dan verifikasi Gapoktan calon peserta program; (2) Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, PMT dan Pengurus Gapoktan; (3) Sosialisasi, koordinasi dan pendampingan (pemberdayaan); (4) Penyaluran dana PUAP; (5) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Proses implementasi program PUAP yang akan dianalisis berlokasi di Kota Prabumulih dan meliputi proses implementasi program pada tahun pertama.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Prabumulih selama empat bulan, yaitu dimulai dari bulan September sampai dengan Desember 2019 dari penyiapan instrument sampai ujian tesis selesai.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan penelitian setelah mereka memberikan jawaban ataupun tanggapan atas beberapa pertanyaan dalam wawancara tentang pelaksanaan program PUAP di Kota Prabumulih. Data primer juga didapatkan dari pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan.

Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya data BPS, hasil studi kepustakaan, laporan – laporan, buku, dokumen, peraturan, jurnal, dokumen, data, foto dan literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan implementasi program PUAP di Kota Prabumulih.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart yang ditetapkan (Sugiyono, 2005:62). Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam sebuah penelitian karena berdasarkan data yang diperoleh akan mengarahkan peneliti dalam memberikan kesimpulan terhadap fenomena yang dicermati. Beberapa tahapan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian adalah : tahap masuk lokasi penelitian, tahapan selama dilokasi penelitian dan tahap berakhirnya pengumpulan data dan keluar dari lokasi penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat kami rincikan sebagai berikut :

Tahap memasuki lokasi penelitian

Pada tahap ini, peneliti memasuki lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu mempelajari dokumen tentang implementasi program PUAP yaitu melalui dokumen KEPMENTAN Nomor. 545/Kpts/OT. 160/9/2007 tentang Tim PUAP dan PERMENTAN Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Umum PUAP, kelompok sasaran PUAP dan organisasi pelaksana PUAP di Kota Prabumulih. Pada Tahapan ini peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung dengan aktifitas yang diamati terkait program. Pengetahuan tentang program yang peneliti dapatkan dalam observasi deskriptif ini sangat membantu peneliti dalam menentukan informan awal yang dijadikan rujukan dalam wawancara untuk mengumpulkan data dilapangan.

Pada tahapan ini dilakukan wawancara dengan sumber yang dapat dipercaya dan relevan dengan obyek penelitian untuk mengetahui fenomena dalam pelaksanaan program PUAP di Kota Prabumulih. Analisis berdasarkan observasi deskriptif dan wawancara yang dilakukan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk pada lapangan penelitian. Oleh karena beragamnya sumber data yang bisa diperoleh maka validitasnya juga bisa sangat beragam. Memperhatikan hal tersebut maka untuk penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan telaahan dokumentasi.

Tahap selama berada dilapangan

Dalam tahapan ini peneliti menjalin hubungan dengan obyek penelitian untuk mencari informasi yang lengkap, dan berupaya menangkap makna berdasarkan informasi dan pengamatan yang diperoleh. Teknik pengumpulan data pada tahapan ini meliputi tiga teknik yaitu :

- 1) Observasi (*observation*), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena, keadaan, tindakan dan peristiwa yang terjadi dilapangan terutama berkaitan dengan objek penelitian secara tidak

terstruktur. Sebagai langkah awal untuk berusaha mengetahui proses penyampaian substansi program yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan, respon kelompok sasaran terhadap program PUAP, kinerja organisasi pelaksana program PUAP, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan program PUAP mengacu kepada faktor komunikasi, ketersediaan sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

- 2) Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan utama dari teknik adalah untuk menyajikan kontruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi keterlibatan dan sebagainya. Menurut Bungin (2011:158) pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi.
- 3) Dokumentasi, adalah pengumpulan dokumen melalui tulisan, buku-buku, literatur, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Berkenaan dengan telaahan dokumentasi kegiatan tidak hanya bersifat mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga mencari makna yang tersirat. Oleh sebab itu dalam telaahan dokumentasi diperlukan sikap kritis dan teliti dalam mencermati dokumen atau arsip yang tersedia atau diperoleh.

Tahap Berakhirnya pengumpulan data dan keluar dari lokasi penelitian.

Tahapan ini akan dimasuki apabila data primer yang didapat sudah jenuh artinya informasi yang didapatkan oleh peneliti tidak menemukan informasi baru lagi. Jika kejenuhann ini sudah terlihat maka peneliti dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan proses analisis data.

Teknik Penentuan informan

Dalam metode penelitian kualitatif tidak dikenal adanya responden, yang ada adalah informan, sedangkan yang dimaksud “informan” adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Jadi informan adalah orang yang memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti baik secara lisan maupun tertulis yang berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan atau dianggap relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi informan kunci guna pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Pengurus Gapoktan, Anggota Gapoktan sampel, Penyelia Mitra Tani dan Tim Teknis dari Dinas Pengelola Dana PUAP dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kota Prabumulih

Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan situasi uraian dasar (Moleong, 2001:13). Menurut Ali (1997:11), analisa data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Dengan demikian, data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian di analisis yaitu proses mengubah data menjadi suatu yang lebih bermakna dan berarti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis kualitatif. Penelitian yang menggunakan tehnik analisis kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita, dimana peneliti berpijak pada realita atau peristiwa yang terjadi dilapangan (Bungin,2003:82). Analisis implementasi program PUAP menggunakan model Smith sebagai alat analisis, dan faktor-faktor penghambat dan pendukung Implementasi program PUAP di Kota Prabumulih dianalisis dengan menggunakan model Edwards III.

Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi (George Edward dalam widodo (2010:96)

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kota Prabumulih

Implementasi merupakan tahapan yang paling berat dalam suatu kebijakan. Hal ini disebabkan masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan, selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi (Nugroho, 2008:436). Beratnya tahapan implementasi dapat dipahami, sebab sesempurna apapun suatu kebijakan akan menjadi bermakna atau tidak, akan terlihat keberhasilannya pada tahapan implementasi. Selain itu akan banyak persoalan yang akan muncul dalam tahapan implementasi, di luar perkiraan perumus kebijakan atau program. Persoalan ini akan menjadi ujian tersendiri bagi implementor kebijakan/program khususnya di tingkat lapangan, dan akan mempengaruhi konsistensi program.

Program PUAP yang merupakan kesatuan program Nasional, mempunyai fragmentasi yang jelas dan terpusat di Menteri Pertanian. Pembagian tugas dan tanggungjawabnya pun berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan daerah dan mekanisme tersebut kembali lagi secara berjenjang dari Gapoktan sampai dengan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu perlu upaya pendistribusian tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas personil/aparat diantara beberapa unit-unit atau aktor implementasi.

Terkait koordinasi dalam implementasi ini kami menganalisis keberadaan koordinasi dan kerjasama yang terbatas koordinasi dan kerjasama yang terbatas antara PMT dan penyuluh pendamping terkait mekanisme pelaporan. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan mekanisme pelaporan secara berjenjang belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu peran Tim Teknis Kota juga harus berupaya menguatkan koordinasi yang berdampak positif bagi sinergi dalam implementasi program. Berdasarkan uraian tentang pengaruh struktur birokrasi terhadap implementasi dapat dipahami bahwa ketiadaan SOP yang berupa Juknis/Juklak, ketiadaan koordinasi dengan PNPM Mandiri serta kurangnya koordinasi diantaranya penyuluh pendamping dan PMT merupakan hambatan dalam struktur birokrasi. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan bahwa keterbatasan struktur birokrasi merupakan faktor penghambat dalam implementasi program PUAP di Kota Prabumulih.

Rekapitulasi Temuan Faktor-Faktor yang Mendorong dan Melemahkan Implementasi Program PUAP di Kota Prabumulih

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong dan melemahkan implementasi program PUAP di Kota Prabumulih dihasilkan temuan sebagai berikut :

Faktor	Fokus	Temuan	Keterangan
Komunikasi	Pemahaman implementor mengenai substansi program melalui sosialisasi dan pelatihan Implementor	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan telah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan implementor tentang substansi program PUAP	Faktor yang Mendorong
	Pemahaman Gapoktan mengenai substansi program melalui sosialisasi dan pelatihan Implementor	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan telah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kelompok sasaran tentang program	Faktor yang Mendorong

Faktor	Fokus	Temuan	Keterangan
Sumberdaya	Ketersediaan sumberdaya manusia <i>implementor</i> yang berkualitas	SDM Penyuluh Pendamping, PMT, Tim Teknis cukup berkualitas (dilihat dari tingkat pendidikan dan pelatihan yang diikuti)	Faktor yang Mendorong
		SDM Pengurus Gapoktan belum cukup memadai (relatif rendah)	Faktor yang Melemahkan
	Ketersediaan sumber daya anggaran	Tidak ada anggaran pendamping program PUAP dari APBD bagi pembinaan dan operasional <i>implementor</i>	Faktor yang Melemahkan
		Terkumpulnya dana swadaya Gapoktan menjadi pendorong bagi penguatan modal Gapoktan	Faktor yang Melemahkan
Sumberdaya	Ketersediaan kewenangan yang cukup bagi <i>implementor</i>	Adanya SK Walikota tentang Tim Teknis Kota menguatkan wewenang Tim Teknis	Faktor Yang Mendorong
		Ketiadaan SK pendamping bagi penyuluh pendamping wilayah yang baru, sehingga membatasi sumberdaya wewenang yang dimiliki, hal ini karena adanya SK Mutasi penyuluh dari Kepala BPPKP yang baru tanpa koordinasi dengan Tim Teknis program PUAP	Faktor yang melemahkan
	Ketersediaan Sumberdaya Informasi	Belum memadainya sumberdaya informasi terkait prosedur pelaporan, sehingga mekanisme pelaporan belum berjalan (ada laporan yang tidak dibuat oleh PMT, tetapi tidak bersifat wajib dibuat)	Faktor yang melamahkan
	Ketersediaan fasilitas (Sarana dan Prasarana) bagi <i>Implementor</i> program	Fasilitas bagi <i>implementor</i> lapangan belum memadai	Faktor yang melamahkan

Faktor	Fokus	Temuan	Keterangan
Disposisi	Ketersediaan insentif bagi <i>implementor</i> program	Tidak ada insentif bagi seluruh <i>implementor</i> program PUAP	Faktor yang melemahkan
	Motivasi dan komitmen <i>implementor</i>	Motivasi dan komitmen <i>implementor</i> cukup tinggi dalam pelaksanaan program PUAP	Faktor yang mendorong
	Motivasi dan komitmen <i>target group</i>	Motivasi dan komitmen kelompok sasaran cukup tinggi dalam pelaksanaan program PUAP	Faktor yang mendorong
Struktur Birokrasi	Keberadaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis	Belum terlaksananya penyusunan Juklak dan Juknis Kota sebagai panduan dalam pelaksanaan program di tingkat lokal	Faktor yang melemahkan
	Fragmentasi	Kurangnya koordinasi antara PMT dan Penyuluh pendamping terkait lokal	Faktor yang melemahkan
		Tingginya frekuensi mutasi pegawai di struktur pemerintahan	Faktor yang melemahkan

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Kesimpulan dan Saran

Implementasi Program PUAP di Kota Prabumulih

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa program PUAP di Kota Prabumulih, secara umum telah terimplementasi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian

Pertanian, walaupun ada tahapan yang belum terimplementasi sesuai ketentuan yang berlaku akibat adanya pengaruh faktor internal dan faktor eksternal program.

Kesimpulan ini ditilik dari :

1. Proses penyampaian substansi program (*idealized policy*) terimplementasi sesuai ketentuan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
2. Proses pendampingan bagi kelompok sasaran (*target group*) terimplementasi sesuai prosedur berlaku dan telah menumbuhkan respon yang positif melalui adanya inisiatif dan partisipasi kelompok sasaran, kecuali pada satu Gapoktan yang dipengaruhi keberadaan faktor lingkungan (*environmental factor*)
3. Pelaksana tugas dan tanggungjawab *implementing organization* meliputi : proses identifikasi dan verifikasi calon Gapoktan, rekrutmen PMT telah terimplementasi sesuai prosedur. Sedangkan penyaluran dana BLM PUAP berlangsung sesuai prosedur pada sepuluh Gapoktan dan ada satu Gapoktan yang belum melakukan penyaluran dana BLM PUAP dikarenakan adanya hambatan eksternal (faktor lingkungan/ *environmental factors*). Proses pembinaan oleh organisasi pelaksana (*implementing organization*) yaitu Tim Teknis/Tim Pelaksana program tergolong minim dilakukan, namun keadaan ini disubstitusikan oleh tingginya intensitas pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pendamping sebagai implementor lapangan. Proses pelaporan sebagai pelaksanaan tugas *implementing organization* belum berjalan sesuai ketentuan. Hal ini merupakan indikasi terganggunya efektifitas implementasi untuk jangka panjang, tetapi sampai saat ini belum mengganggu tahap implementasi program yang sedang berjalan.
4. Adanya pengaruh faktor lingkungan eksternal (*environmental factors*) yaitu faktor budaya, sosial dan politis pada satu lokasi kelompok sasaran, yang menyebabkan terhambatnya penyaluran/realisasi dana BLM PUAP yang merupakan indikator output dari implementasi program.

Faktor-faktor yang mendorong Implementasi Program PUAP di Kota Prabumulih

Berdasarkan analisis proses implementasi program PUAP di Kota Prabumulih, ditemukan faktor-faktor yang memperkuat implementasi program yang meliputi :

1. Komunikasi tentang substansi program yang tersampaikan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi, sehingga menimbulkan persepsi yang benar tentang wujud program dan tujuan program PUAP jangka panjang
2. Komunikasi yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan bagi implementor telah memberikan peningkatan keterampilan dan pemahaman akan substansi program.
3. Ketersediaan SDM *implementor* lapangan (penyuluh pendamping dan PMT) dengan latar belakang pendidikan yang memadai (rata-rata Strata Satu) dan sudah dibekali dengan pelatihan pendampingan PUAP.
4. Keberadaan dan swadaya dalam Gapoktan yang bersumberkan dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, bersifat menguatkan modal

masyarakat dalam kelembagaan Gapoktan disamping dana stimulan BLM PUAP.

5. Adanya komitmen dan motivasi yang tinggi dari kelompok sasaran (Gapoktan), menimbulkan disposisi yang positif terhadap implementasi program PUAP di Kota Prabumulih.

Faktor-Faktor yang melemahkan Implementasi Program PUAP di Kota Prabumulih

Berdasarkan analisa proses implementasi program PUAP di Kota Prabumulih, ditemukan faktor-faktor yang melemahkan implementasi program PUAP yang meliputi :

1. Keterbatasan SDM pengurus Gapoktan, sehingga menuntut pendampingan yang intensif dari fasilitator.
2. Ketiadaan sumberdaya anggaran yaitu dana pendamping PUAP dari APBD, menyebabkan pembinaan program berjalan tersendat-sendat dan tidak tersedianya dana tambahan bagi penguatan modal Gapoktan
3. Keterbatasan sumberdaya kewenangan bagi penyuluh pendamping yang dimutasi akibat belum terbitnya SK pendampingan wilayah binaan PUAP yang baru.

Tidak mungkin merevisi SK Walikota yang berjalan belum satu tahun, karena kurangnya koordinasi kepala BPPKP Kota Prabumulih yang baru dengan Tim Teknis program PUAP sehingga sumber kewenangan tidak digunakan semaksimal mungkin.

Menurut Sekretaris Tim Pembina Pusat Provinsi SK Walikota mengenai Tim Teknis dan Tim Pengelola program PUAP dapat berlaku dan digunakan selama Lima Tahun atau selama program PUAP ada maka seluruh *implementor* baik lapangan maupun administrator tidak boleh diganti, hal ini supaya dapat meminimalisir penyalahgunaan sumberdaya kewenangan

4. Kurang memadainya sumberdaya fasilitas (sarana pendukung) bagi *implementor* lapangan yaitu penyuluh pendamping dan PMT, meski semangat mereka patut diperjuangkan
5. Terhambatnya Fragmentasi yang dikarenakan belum adanya koordinasi antara tim pelaksana dengan Tim Pengarah PNPM Mandiri serta kurangnya koordinasi antara PMT dan penyuluh pendamping

Saran

1. Untuk lebih mengembangkan studi implementasi kebijakan yang berhubungan dengan program PUAP, maka penulis mengharapkan untuk diadakan lagi penelitian lanjutan terkait implementasi program PUAP di Kota Prabumulih dengan menggunakan metode kualitatif terkait pengaruh faktor lingkungan sosial, budaya dan politis (Faktor lingkungan) yang ternyata menghambat implementasi program pada satu lokasi kelompok sasaran program.

2. Perlunya pembinaan, pendampingan dan pelatihan yang lebih intensif dengan jadwal yang periodis untuk peningkatan SDM anggota Gapoktan maupun pengurus Gapoktan terkait aktifitas pelaporan, koordinasi, budidaya pertanian, maupun dalam hal pembukuan/keuangan mikro dana BLM PUAP bagi bendahara Gapoktan
3. Perlu diarahkan kembali kepada Gapoktan yang belum melaksanakan mekanisme dana swadaya secara maksimal, untuk : 1). Mengarahkan kepada semua anggota penerima pinjaman dana, agar mewajibkan simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela; 2). Membuat produk jasa bank yang lainnya termasuk usaha diluar usaha tani; 3). Melakukan kerjasama dengan pihak lain/swasta terkait penggalangan dana diluar dana BLM PUAP.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung
- Bungin, B 2011. *Metodologi Penelitian kualitatif: analisis Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta
- Bustaman, S., M. Mardiharini, A. Djauhari., S.S. Tan. 2011. Pengkajian Pola dan Metode Rating Gapoktan PUAP (Grade A, B, C) Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Komoditas Unggulan (Padi, Sapi Potong dan Kakao) >20% Melalui Percepatan Adopsi Teknologi Pertanian. *Laporan Hasil Pengkajian* (belum dipublikasi).
- Departemen Pertanian, 2009. *Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian. 2011. *Pedoman Penilaian Gapoktan PUAP Berprestasi*. Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Dwimanur, K. dan H. Wibowo. 2014. “Strategi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Pasca Program Pengembangan Usaha Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Kuningan”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2(1): 26-52.
- Edward III, G.C.1980. *Implementing Public Policies*. Congressional Quarterly PressInc. Washington
- Hendayana, R. 2011. *Penguatan modal petani pada gabungan kelompok tani penerima BLM PUAP*. hlm 13-24. Dalam K.Subagyo, R. Hendayana, S. Bustaman (Penyunting). *Petani Butuh Modal*. Badan Litbang Pertanian.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi : Konsep, Teori dan Isi*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Jhonston, J. 1972. *Econometries Methode*. Dalam AgoesThony.Ak (2008) *Revitalisasi Klaster Agribisnis Perakayuan Dalam Perspektif Keberlanjutan Ekologis-Ekonomis-Sosial Hutan Tanaman Industri Acacia Mangium Wild*. (Disertasi, Tidak Dipublikasikan) Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2008)
- Kementerian Pertanian. 2013. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2013*. Jakarta: Kementerian Pertanian. 40 hlm.

- Kementerian Pertanian. 2010. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 545/Kpts/OT.160/9/2007. *Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*.
- Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 *Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*.
- Koutsoyiannis, A.1985. *Theory Of Econometrics : An Introductory Exposition Of Econometrics Methods*. 2 nd. Ed. The Mac.Millan Press Ltd. USA. Dalam Thony 2001
- Martiana, Hasudungan, dan Jufri. 2012. Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”. *Jurnal Ilmu-ilmu Agribisnis* 1(1): 1-13.
- Moleong, Lexi J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Publik Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. PT Gramedia. Jakarta
- Parsons, W. 2005. *Public Policy : Pengantar teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media. Indonesia
- Pangestika, C.R., S. Sjamsuddin. Dan Suwondo. 2015. “Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Studi Kasus Gapoktan Tri Langgeng Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi)”. *Jurnal Administrasi Publik* 3(5): 752-757.
- Pasaribu dkk. (2011). *Penentuan Desa Calon Lokasi PUAP 2011 dan Evaluasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/Ot.160/4/2007 *Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 29/Permentan/OT.140/5/2011 Tanggal: 30 Mei 2011. *Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Pengembangan Usaha Agribisnis Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Berprestasi Tahun Anggaran 2011. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Inovasi Teknologi Pertanian* 741
- Ripley, R.B. dan Franklin, G.A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press Chichago
- Sjarkowi, Facrurrozie. 1995. *Metodoligi Penelitian* Universitas Sriwijaya. Palembang
- Suprpto. A. 2012. *Pokok-pokok bahasan terhadap pelaksanaan PUAP*. Makalah disampaikan pada *Workshop PUAP* di Botani Square 8 Agustus 2012.
- Suryahadi, Asep. (2007). Kumpulan bahan latihan pemantauan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan. *Modul 4: Persyaratan dan Unsur-unsur Evaluasi yang Baik*. Bappenas, Jakarta. www.ditpk.bappenas.go.id

- Tachan, H. 2008. Implementasi kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi). Bandung
- Thony, Agoes. 2007. *Metodologi Penelitian Bahan Agar Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian Dosen Di Perguruan Tinggi Swasta Se-Sumatera Bagian Selatan*. 2007
- Utami, R.A. 2015. “Analisis Keberlanjutan dan Pola Pengembangan Co-operative Entrepreneurship Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19(1): 65-77
- Wahab, S.A. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta